HARIAN
UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK
01 MARET 2011
PENDIRI
ARDI, S.Si, Apt
EDISI: RABU
28 OKTOBER 2026

BUTON-BUTENG-BUSEL-BUTUR-WAKATOBI-MUNA-MUBAR
KOLAKA-BOMBANA-KENDARI-BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

www.baubaupost.com
www.durasitimes.com

ECERAN Rp 5.000 | BERLANGGANAN RP 100.000/ BULAN | LANGGANAN & IKLAN HUBUNGI HP/WA: 082160543989

Kepala SDN 2 Baadia Baubau Nursida Tekankan Keselamatan Siswa Setelah Pembelajaran Kembali Normal Usai Kabut Asap



Laporan: Firman

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka setelah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kondisi kabut asap dihentikan. Kebijakan tersebut diharapkan mengoptimalkan capaian belajar peserta didik dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga sekolah.

Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 2 Baadia Baubau Nursida kembali berlangsung normal mulai Senin, 26 Oktober 2026, setelah siswa menjalani pembelajaran dari rumah pada 19-24 Oktober 2026. Selama periode tersebut, sekolah meminta peserta didik melaporkan aktivitas belajar yang mereka lakukan di rumah.

Kepala SD Negeri 2 Baadia Baubau Nursida MPd MPd mengatakan, pembelajaran jarak jauh belum sepenuhnya mampu menggantikan kegiatan belajar secara langsung. Salah satu kendalanya ialah keterbatasan fasilitas yang dimiliki sebagian siswa untuk mengikuti pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom.

Lanjut ke Hal: 7



Laporan: Firman/ Prasetyo M , Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Baubau menyiapkan 24 personel untuk melaksanakan Operasi Patuh Anoa 2026 selama 14 hari dengan menyasar 10 jenis pelanggaran lalu lintas. Operasi ini mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif, tetapi penindakan tetap dilakukan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kasat Lantas Polres Baubau IPTU Chaidir Akbar, S.IP., mengatakan, keberhasilan operasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga oleh peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. “Tujuan sebenarnya adalah peningkatan kepatuhan masyarakat. Intinya, yang paling utama adalah menekan angka kecelakaan lalu lin-

Lanjut ke Hal: 7

ASDP Digitalisasi Tiket Baubau-Waara, Antrean Berkurang dan Manifes Lebih Akurat



Laporan: Firman

BAUBAU, BP - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau menerapkan sistem pembelian tiket elektronik (e-ticketing) pada lintasan penyeberangan Baubau - Waara sejak 19 Oktober 2026. Digitalisasi layanan ini ditujukan untuk mempermudah pembeli-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Bawa Potensi Buton Tengah ke Forum Investasi Nasional di Depok



Laporan: Ardi

DEPOK, BP- Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, mendorong pengembangan potensi daerah melalui investasi berkualitas yang mampu memperluas aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut disampaikan dalam Diskusi Nasional bertema “Peran Kepala Daerah Mengawal Investasi Berkualitas untuk Pemberdayaan Masyarakat” di The Margo Hotel, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (23/10/2026).

Dalam forum yang diselenggarakan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI itu, Azhari menjadi salah satu narasumber yang memperkenalkan potensi Kabupaten Buton Tengah kepada pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan pembangunan.

Azhari menekankan pentingnya membawa potensi daerah ke tingkat nasional agar semakin dikenal dan terhubung dengan jaringan pasar yang lebih luas. Menurut dia, pengenalan tersebut menjadi bagian dari upaya membuka peluang investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Potensi Buton Tengah perlu diperkenalkan lebih luas agar dapat menarik minat investor dan berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat,” demikian inti pesan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Memasuki usia ke-12 tahun, Kabupaten Buton Tengah memiliki beragam potensi yang memerlukan pengembangan dan dukungan investasi. Pemerintah daerah berharap potensi tersebut dapat dioptimal-

Lanjut ke Hal: 7

Menuju Porprov XV Kendari, IMI Sultra Petakan Potensi Pembalap Muda Kota Baubau

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP - Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Tenggara memantau penjaringan calon atlet balap motor di Kota Baubau untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sultra ke-XV. Pemantauan berlangsung di Terminal Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Minggu (25/10), dengan melibatkan pembalap pemula dari Baubau dan sejumlah pembalap dari wilayah Kepulauan Buton, termasuk Buton Selatan.



Biro Pengembangan Bisnis dan Promosi IMI Sultra, Budi Amin, mengatakan penjaringan tersebut menjadi tahapan untuk mengidentifikasi pembalap potensial yang dapat dipersiapkan mewakili Kota Baubau pada ajang olahraga tingkat provinsi. Pendataan lebih lanjut akan dikoordinasikan dengan IMI Kota Baubau sehingga jumlah

Lanjut ke Hal: 7

Rabu, 28 Oktober 2026 — BAUB AU POST — www.baubaupost.com

Dua Anak Gus Irfan Mundur, Polemik Nepotisme dan Transparansi Kemenhaj Disorot



Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) didampingi Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan).

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Pengunduran diri Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz dari jabatan tenaga ahli Kementerian Haji dan Umrah memicu perhatian terhadap transparansi pengisian jabatan publik. Keduanya merupakan anak Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan yang memilih mundur setelah pengangkatan mereka menuai kritik terkait dugaan nepotisme.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pengunduran diri kedua tenaga ahli tersebut telah diterima bersama Gus Irfan di kantor kementerian, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026). Keputusan itu diambil setelah polemik penunjukan keduanya berkembang luas di tengah masyarakat.

"Hari ini kami, saya dan Pak Menteri sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut," kata Dahnil.

Menurut Dahnil, keputusan tersebut merupakan langkah untuk menjaga integritas lembaga sekaligus merespons kritik publik. Ia menegaskan bahwa kementerian harus terbebas dari praktik yang bertentangan dengan etika, termasuk manipulasi, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan.

Sorotan terhadap pengangkatan Barbarossa dan Gibran menguat setelah dokumen yang beredar di media sosial menyebut Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 sebagai dasar penunjukan tenaga ahli. Hubungan keluarga kedua tenaga ahli dengan pejabat yang memimpin kementerian menjadi salah satu alasan munculnya pertanyaan mengenai proses pengangkatan tersebut.

Dahnil menjelaskan, keterlibatan keduanya bermula saat Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dibentuk pada akhir Oktober 2024. Pada tahap awal, lembaga tersebut menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, belum memiliki struktur organisasi lengkap, serta belum didukung kantor dan staf administrasi yang memadai.

Ia menyebut Barbarossa dan Gibran ikut membantu pekerjaan awal BP Haji tanpa menerima gaji. Saat itu, menurut Dahnil, lembaga tersebut baru dijalankan oleh Gus Irfan sebagai pimpinan dan dirinya. Keterlibatan mereka berlangsung ketika BP Haji masih berada dalam tahap perintisan.

Secara terpisah, Gus Irfan menjelaskan bahwa kedua anaknya bersama sejumlah santri membantu pembentukan BP Haji secara sukarela selama tiga hingga empat bulan. Setelah kelembagaan berkembang menjadi kementerian, sejumlah orang yang dinilai memiliki integritas dan kompetensi kemudian diangkat menjadi tenaga ahli.

Meski demikian, pengunduran diri kedua anak menteri tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum. Dugaan nepotisme perlu dinilai berdasarkan proses pengangkatan, persyaratan jabatan, kewenangan pejabat, serta ada atau tidaknya keuntungan bagi keluarga yang bertentangan dengan kepentingan publik. Posisi tenaga ahli yang kosong selanjutnya akan diisi sesuai kebijakan dan arahan Menteri Haji dan Umrah.

Dalam sejarah Indonesia, tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme menguat pada masa Reformasi 1998. Salah satu tonggak hukumnya adalah TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang ditetapkan pada 13 November 1998. Ketentuan itu kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada 31 Oktober 2003. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kerangka internasional ini mendorong penguatan pencegahan korupsi, integritas aparatur, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam polemik Kemenhaj, prinsip-prinsip tersebut relevan sebagai acuan tata kelola, sedangkan penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus mengacu pada hukum nasional.(*)

Polemik Ijazah Gibran Bergulir ke DPR, PKS Bangun Komunikasi Antarfraksi



Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Laporan: Alwan

JAKARTA,k BP- Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Pemilihan Presiden 2024 kembali menjadi perhatian politik nasional setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan tidak menemukan dokumen sah yang membuktikan ijazah atau surat keterangan kelulusan setingkat SMA atau sederajat yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Menyikapi persoalan itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menjajaki sikap fraksi-fraksi di DPR RI, sedangkan PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan terbuka untuk berdialog.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan, partainya akan membangun komunikasi dengan fraksi lain untuk mengetahui pandangan dan sikap mereka terhadap tindak lanjut putusan MK. Langkah tersebut merupakan arahan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf.

"Presiden PKS menugaskan fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya. Kita tentu perlu menjajaki pandangan dan sikap fraksi lainnya," ujar Kholid, Selasa (20/10).

PKS menilai polemik tersebut perlu ditempatkan sebagai persoalan yang lebih luas, yakni evaluasi tata kelola pemilu dan pemenuhan persyaratan pencalonan pejabat publik. Kholid menyebut partainya ingin menjadi penghubung aspirasi masyarakat dalam pembahasan di parlemen.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak menutup pintu komunikasi dengan fraksi lain. Pernyataan itu disampaikan Hasto kepada wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10).

"Ya, kami membuka ruang untuk dialog," kata Hasto.

Hasto juga mengatakan PDIP mencermati kritik sejumlah guru besar yang menyoroti persoalan tersebut. Menurut dia, polemik persyaratan pendidikan dan dugaan pelanggaran etika telah menjadi persoalan serius yang dapat memengaruhi persepsi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sendiri merupakan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, salah satu partai dengan kekuatan besar di DPR.

Dalam putusannya, MK menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan dari kementerian terkait yang didasarkan pada certificate of attendance atau sertifikat kehadiran dan transkrip nilai tidak dapat disamakan dengan ijazah atau certificate of completion, yakni dokumen yang membuktikan kelulusan. Namun, MK tidak menerima permohonan Denny Indrayana dan pihak lainnya untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Mahkamah kemudian menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan itu mendorong munculnya pembicaraan di antara fraksi-fraksi DPR mengenai kemungkinan tindak lanjut sesuai kewenangan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.

Secara historis, persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden telah menjadi bagian dari perdebatan hukum pemilu di Indonesia, terutama sejak reformasi dan perubahan sistem pemilihan presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk ketentuan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Perdebatan mengenai persyaratan calon pejabat publik memperlihatkan pentingnya kejelasan dokumen dan mekanisme verifikasi oleh penyelenggara pemilu.

Dalam konteks internasional, sejumlah negara juga menerapkan persyaratan konstitusional atau administratif bagi kandidat jabatan publik. Amerika Serikat, misalnya, menetapkan persyaratan kewarganegaraan, usia, dan masa tinggal bagi calon presiden dalam Konstitusinya, sedangkan verifikasi kelayakan kandidat di berbagai negara menjadi bagian dari proses pemilu yang diatur hukum masing-masing. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kepastian persyaratan pencalonan dan transparansi administrasi merupakan unsur penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Meski demikian, pembahasan lanjutan atas polemik dokumen pendidikan Gibran tetap harus mengacu pada isi putusan MK, ketentuan hukum yang berlaku, serta kewenangan masing-masing lembaga. Komunikasi antarfraksi yang dijajaki PKS dan keterbukaan dialog PDIP menjadi perkembangan politik berikutnya, tetapi belum dengan sendirinya menunjukkan adanya kesepakatan DPR untuk mengambil langkah tertentu.(*)

Gubernur Sultra ASR Tekankan Nasionalisme, Persatuan, dan Cinta Produk Lokal



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mengajak peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laskar Gerindra Sultra memperkuat wawasan kebangsaan, menjaga persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap produk dalam negeri. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan materi di Aula Kedatangan Arafah, Asrama Haji Kendari, Selasa malam (27/10/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (30/10/2026) itu, Gubernur juga memaparkan tantangan pembangunan daerah, terutama optimalisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pentingnya memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Andi Sumangerukka menjelaskan, wawasan kebangsaan tidak sekadar pemahaman mengenai identitas dan kehidupan bernegara, tetapi juga cara pandang dalam menghadapi persoalan bangsa dengan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai tersebut perlu diwujudkan melalui sikap saling menghormati, kepedulian sosial, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

"Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang terhadap bangsa beserta berbagai persoalan yang dihadapi, dengan mengedepankan tekad, persatuan, dan kesatuan untuk mencari penyelesaian," demikian penekanan materi yang disampaikan Gubernur dalam diklat tersebut.

Selain membahas nasionalisme, Gubernur menyoroti pentingnya keberpihakan masyarakat terhadap produk lokal. Menurut dia, kebiasaan menggunakan produk dalam negeri dapat membantu petani, pelaku usaha, dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketergantungan terhadap produk impor juga perlu diperhatikan karena perubahan nilai tukar dapat memengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Gubernur juga menekankan bahwa prinsip kebenaran dan kebaikan harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas maupun berinteraksi dengan masyarakat. Kedua prinsip itu dinilai penting untuk menjaga integritas, membangun kepercayaan, dan memastikan setiap tindakan dilakukan secara bertanggung jawab.

Di bidang pembangunan, ia menyoroti perlunya pengelolaan sumber daya alam dan anggaran secara tepat sasaran. Kekayaan daerah, menurut dia, perlu diikuti kebijakan yang mampu memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pendidikan, pemberian beasiswa, dan penanganan masalah gizi turut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Sultra.

Ia turut memaparkan sejumlah program pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengembangan kampung nelayan, dan swasembada pangan. Peserta diklat diharapkan memahami tujuan program tersebut sehingga dapat menyampaikan informasi secara benar kepada masyarakat, bukan sekadar meneruskan informasi tanpa memahami konteksnya.

Secara historis, pesan tentang persatuan memiliki akar kuat dalam perjalanan Indonesia. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari beragam latar belakang menyatakan tekad untuk bertanah air, berbangsa, dan menjunjung bahasa persatuan yang sama. Ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda itu menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan nasionalisme Indonesia.

Di tingkat internasional, dorongan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab juga tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Tujuan 12. Agenda tersebut mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien dan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. Meski berbeda konteks dengan kebijakan nasional, prinsip itu relevan sebagai latar pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya dan pilihan konsumsi masyarakat.

Diklat yang mengusung semangat "Kompak, Bergerak, Berdampak' tersebut diikuti peserta dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sultra dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra kabupaten/kota se-Sultra. Melalui kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu, Gubernur berharap peserta dapat menerapkan nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, mendukung produk dalam negeri, serta berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah.(*)

Kendari Tembus Enam Besar Nasional, TPA dan IPLT Diperiksa Kementerian PU



Laporan: Lisna

KENDARI, BP- Kota Kendari masuk dalam enam daerah yang lolos ke tahap akhir penilaian nasional penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi. Tim Penilai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara melakukan verifikasi lapangan di Kendari, Senin (26/10/2026), untuk mencocokkan dokumen penilaian dengan kondisi fasilitas sanitasi, persampahan, dan pengolahan limbah cair.

Verifikasi berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (28/10/2026). Pemeriksaan mencakup keandalan operasional tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), termasuk kelayakan fasilitas teknis, efektivitas pengolahan limbah, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menerima tim penilai bersama jajaran asisten Sekretariat Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait. Pemerintah kota memandang kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sanitasi sekaligus memperkuat pengelolaan lingkungan perkotaan.

"Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program penataan lingkungan hidup secara komprehensif," kata Siska dalam sambutannya.

Tim penilai juga mendengarkan paparan dari dinas teknis sebelum melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah sarana pengelolaan persampahan dan limbah cair. Seluruh rangkaian kegiatan didampingi tim internal Pemkot Kendari untuk memastikan proses evaluasi berjalan sesuai agenda.

Perwakilan Tim Penilai Kementerian PU menjelaskan, batas akhir pengumpulan rekapitulasi hasil penilaian ditetapkan pada 28 Oktober 2026. Verifikasi di enam daerah terpilih, yang terdiri atas tiga kota dan tiga kabupaten, dilaksanakan secara intensif agar seluruh hasil pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Sebelum melakukan penilaian di Kendari dan daerah lainnya, tim Direktorat Sanitasi Kementerian PU telah menyelesaikan verifikasi lapangan di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada pekan sebelumnya. Setelah seluruh data diolah dan peringkat ditetapkan oleh tim juri pusat, perwakilan enam daerah dijadwalkan diundang pada 30 Oktober 2026 untuk menghadiri malam penganugerahan penghargaan.

Penilaian tersebut berkaitan dengan tantangan sanitasi yang masih menjadi agenda pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas bersama UNICEF menyusun peta jalan sanitasi aman menuju 2030 untuk mempercepat akses layanan yang aman dan berkelanjutan. Dokumen tersebut menyoroti kemajuan Indonesia dalam memperluas akses sanitasi dasar, sekaligus menegaskan bahwa pemerataan layanan sanitasi aman masih memerlukan upaya lebih lanjut.

Secara global, sanitasi menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 6 tentang air bersih dan sanitasi layak. Agenda yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 itu menargetkan akses sanitasi dan kebersihan yang memadai bagi semua serta peningkatan pengolahan air limbah hingga 2030.

Wali Kota Kendari berharap proses evaluasi tersebut memberikan hasil positif bagi daerahnya dalam penilaian nasional. Namun, pemerintah kota menempatkan peningkatan kualitas lingkungan sebagai tujuan utama, yakni mewujudkan Kendari yang bersih, sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Penghargaan dari pemerintah pusat diharapkan menjadi pengakuan atas upaya pengelolaan sanitasi yang konsisten, sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(*)

Bupati Alvin Akawijaya Dampingi Investor Turki Lirik Aspal Buton, Anggota DPR RI Ali Mazi Dorong Investasi Industri



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, membuka peluang investasi asing di sektor aspal alam setelah delegasi investor asal Turki meninjau langsung fasilitas pengolahan, jalur distribusi, dan lokasi cadangan aspal pada Sabtu (10/10/2026). Kunjungan yang difasilitasi Anggota DPR RI Komisi XIII, H. Ali Mazi, S.H., itu bertujuan memastikan potensi bahan baku sekaligus menjajaki peluang pengembangan industri aspal di daerah tersebut.

Peninjauan tersebut melibatkan Bupati Buton Alvin Akwijaya Putra, S.H., Sekretaris Daerah Buton La Ode Syamsuddin, S.Pd., M.Si., serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Delegasi investor juga didampingi tim ahli geologi dari Turki untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap potensi sumber daya aspal alam yang dimiliki Kabupaten Buton.

Rombongan mengawali kunjungan di pabrik pengolahan aspal milik PT Karya Prima Abadi di Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu. Di lokasi itu, investor memperoleh penjelasan mengenai tahapan pengolahan, mulai dari ekstraksi hingga pemisahan material aspal dari batuan alam.

Setelah meninjau fasilitas produksi, delegasi bergerak ke Pelabuhan Nambo di Desa Nambo, Kecamatan Lasalimu. Pelabuhan tersebut menjadi salah satu jalur distribusi aspal untuk memenuhi permintaan pasar di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri.

Peninjauan dilanjutkan ke sejumlah lokasi cadangan aspal alam. Para investor melihat langsung material di lapangan dan mengambil sampel beberapa batuan untuk mendukung proses penilaian teknis. Rangkaian kunjungan ini diharapkan memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai ketersediaan bahan baku, fasilitas pengolahan, dan akses distribusi sebelum keputusan investasi diambil.

Ali Mazi mengatakan, fasilitasi kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam. Ia berharap peninjauan lapangan dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sulawesi Tenggara sekaligus putra daerah Kabupaten Buton, saya memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian di daerah kita," ujar Ali Mazi.

Ia berharap peluang yang terbuka tidak berhenti pada kunjungan, tetapi berlanjut menjadi investasi konkret. Bentuk kerja sama yang berpotensi dijajaki antara lain kemitraan dengan perusahaan aspal lokal atau pembangunan fasilitas pengolahan baru di Kabupaten Buton.

Bupati Alvin Akwijaya Putra menyambut positif kedatangan delegasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Buton, kata dia, berkomitmen memfasilitasi calon investor yang berminat mengembangkan industri aspal, termasuk melalui peninjauan langsung terhadap potensi sumber daya yang tersedia.

"Melalui peninjauan langsung ini, kami ingin meyakinkan para investor sehingga mereka siap berinvestasi serta membangun industri aspal di Kabupaten Buton," tegas Alvin.

Aspal alam Buton memiliki nilai strategis dalam sejarah industri bahan baku jalan di Indonesia. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad ke-20, endapan aspal di Pulau Buton telah dikenal dan ditambang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan. Dalam perkembangan industri aspal dunia, bahan pengikat jalan juga menjadi komoditas penting seiring pertumbuhan jaringan transportasi dan infrastruktur, meskipun banyak negara mengandalkan aspal hasil pengolahan minyak bumi.

Potensi geologi saja belum cukup untuk menjamin investasi dapat terealisasi. Kepastian cadangan yang layak ditambang, kualitas material, biaya produksi, teknologi pengolahan, akses logistik, serta kepastian pasar menjadi faktor penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Sampel batuan yang dibawa investor Turki dapat menjadi salah satu bahan evaluasi, tetapi belum menunjukkan adanya keputusan investasi.

Kunjungan tersebut menjadi tahap awal penjajakan kerja sama internasional bagi pengembangan aspal Buton. Pemerintah daerah berharap potensi sumber daya alam itu dapat diolah dengan nilai tambah lebih besar di daerah asalnya, membuka kesempatan kerja, memperkuat industri lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton.(*)

Buton Jadi Percontohan Pangan Biru, Bappenas dan Stanford Soroti Gizi serta Nelayan



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menjadi lokasi proyek percontohan pengembangan pangan akuatik berkelanjutan atau blue food untuk memperkuat pemenuhan gizi anak dan ibu sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program yang diluncurkan bersama Kementerian PPN/Bappenas, Stanford Center for Ocean Solutions, dan Rare Indonesia itu diarahkan pada penguatan kapasitas nelayan, perlindungan ekosistem pesisir, serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Peluncuran proyek bertema "Laut Lestari untuk Generasi yang Sehat: Pemanfaatan Pangan Akuatik Lokal untuk Pemenuhan Gizi Anak dan Ibu" berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Pasarwajo, Selasa (27/10/2026). Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., menyatakan pemerintah daerah mendukung inisiatif tersebut sebagai upaya mengoptimalkan potensi perikanan untuk kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Mohamad Rahmat Mulianda, mengatakan pangan akuatik tidak hanya berkaitan dengan produksi perikanan tangkap dan budi daya, tetapi juga menjadi sumber nutrisi berkualitas dan penggerak ekonomi lokal. Menurut dia, potensi sumber daya kelautan Buton dan komitmen pemerintah daerah menjadi pertimbangan dalam penetapan wilayah tersebut sebagai lokasi percontohan.

"Pangan akuatik bukan hanya soal sektor perikanan tangkap atau budi daya semata, melainkan fondasi penting dalam penyediaan nutrisi berkualitas tinggi bagi masyarakat, sekaligus penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan," ujar Rahmat.

Program tersebut mencakup penguatan kemampuan nelayan lokal, perlindungan ekosistem pesisir sebagai penopang produksi pangan akuatik, serta integrasi data ilmiah ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Kolaborasi pemerintah, lembaga riset internasional, dan organisasi konservasi diharapkan menghasilkan model tata kelola perikanan skala kecil yang dapat diterapkan di wilayah pesisir lainnya.

Direktur Stanford Center for Ocean Solutions, Profesor Jim Leape, mengatakan lembaganya telah bekerja sama dengan Bappenas selama tiga tahun untuk mendorong integrasi pangan biru ke dalam sistem pangan Indonesia. Ia menyebut keterlibatan Stanford juga didukung para pakar yang telah mengerjakan berbagai aspek pengembangan sistem pangan di Indonesia selama puluhan tahun.

Jim menjelaskan, pengembangan pangan biru di Buton diarahkan untuk mencapai tiga sasaran utama, yakni memperbaiki kualitas gizi, memperkuat mata pencaharian masyarakat pesisir, dan mendorong pemberdayaan nelayan skala kecil secara berkelanjutan. Pemanfaatan pangan akuatik diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan protein dan mikronutrien yang penting bagi pertumbuhan anak.

Bupati Alvin menilai pencapaian target tersebut membutuhkan kesamaan visi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan, kekayaan sumber daya alam harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat mampu mengelola potensi perikanan secara optimal.

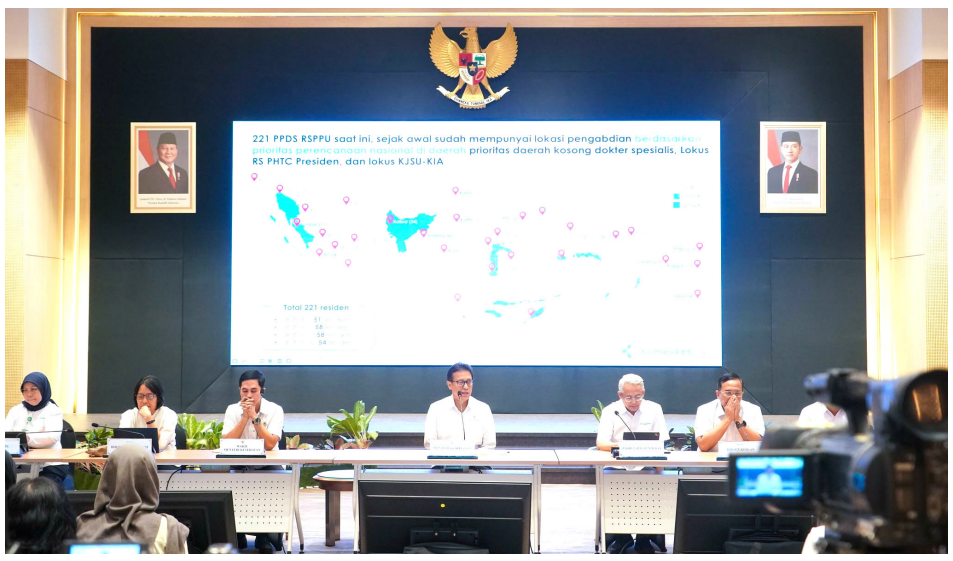
"Peningkatan sumber daya manusia juga sangat penting menurut saya. Ini harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat kita mampu mengelola dan mengembangkan potensi perikanan secara maksimal," kata Alvin.

Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memastikan bantuan pemerintah pusat dijaga dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menurut Alvin, dukungan program dan inovasi yang masuk ke daerah perlu ditindaklanjuti agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Dari perspektif sejarah, pengembangan pangan biru sejalan dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap peran laut dalam ketahanan pangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 2022 sebagai Tahun Internasional Perikanan dan Budi Daya (International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture) untuk menyoroti kontribusi nelayan skala kecil dan pembudi daya ikan. Sementara itu, laporan The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menegaskan pentingnya perikanan dan budi daya perairan bagi penyediaan pangan serta mata pencaharian masyarakat dunia.

Di Indonesia, arah pengembangan tersebut berkaitan dengan agenda pembangunan ekonomi biru, pengelolaan sumber daya kelautan, dan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Namun, keberhasilannya di Buton akan bergantung pada pelaksanaan program di lapangan, kesinambungan pendampingan nelayan, perlindungan lingkungan pesisir, serta kemampuan menghubungkan produksi pangan lokal dengan kebutuhan gizi masyarakat. Melalui proyek percontohan ini, Buton diharapkan dapat menunjukkan bagaimana potensi laut dapat dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan kesehatan secara bersamaan.(*)

Kekurangan 55.192 Dokter Spesialis, Kemenkes Percepat Pemerataan Layanan Kesehatan



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia setelah data per 21 Oktober 2026 menunjukkan 93 persen wilayah masih membutuhkan tenaga medis tersebut, dengan total kekurangan mencapai 55.192 dokter. Pemerintah menempuh sejumlah strategi, mulai dari pendidikan berbasis rumah sakit, penugasan dokter ke daerah prioritas, pemberian beasiswa, hingga pelatihan lanjutan di dalam dan luar negeri.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan persoalan tersebut dalam konferensi pers Dua Tahun Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurut dia, keterbatasan dokter spesialis menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kapasitas rumah sakit, terutama di daerah yang belum memiliki tenaga medis secara memadai.

"Dari 66 RSUD PHTC yang sedang dibangun, yang memiliki kelengkapan dokter spesialis baru mencapai 51 persen. Karena itu, Kemenkes berupaya mengisi kekurangan tersebut," kata Budi.

Untuk mempercepat penambahan dokter spesialis, pemerintah mengembangkan pendidikan berbasis rumah sakit atau hospital-based melalui program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Sejak 2024, program tersebut telah memiliki 221 peserta didik dalam empat angkatan. Pada 2026, Kemenkes mengembangkan 55 program studi pendidikan dokter spesialis di 52 rumah sakit.

Program pendidikan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tujuh spesialis dasar sekaligus memperkuat layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA). Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, enam RSPPU telah memperoleh akreditasi dari ACGME International dan LAM-PT-Kes.

Kebijakan ini melanjutkan upaya pemerintah memperbaiki distribusi dokter spesialis yang selama bertahun-tahun terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pada 2024, Kemenkes meluncurkan model pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit sebagai salah satu alternatif untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis. Pada periode tersebut, pemerintah juga menyoroti ketimpangan distribusi dokter spesialis, termasuk konsentrasi tenaga medis di Pulau Jawa. Persoalan serupa menjadi perhatian internasional melalui strategi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang tenaga kesehatan global yang diluncurkan pada 2016 untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan hingga 2030.

Menkes Budi mengatakan perekrutan peserta didik dengan mempertimbangkan asal daerah menjadi bagian penting dari strategi pemerataan. Pemerintah berharap dokter yang menyelesaikan pendidikan dapat kembali ke daerah asal dan memperkuat fasilitas kesehatan setempat.

"Kita merekrut putra-putri asli daerah, bukan orang Jakarta. Itu sebabnya, begitu selesai pendidikan, mereka pasti akan kembali ke daerah," ujar Budi.

Sambil menunggu hasil pendidikan yang membutuhkan waktu sekitar empat tahun, Kemenkes mengirim dokter spesialis ke rumah sakit prioritas. Hingga Juli 2026, sebanyak 371 dokter spesialis telah ditugaskan untuk memperkuat rumah sakit dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), layanan KJSU-KIA, serta wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

"Pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu sekitar empat tahun. Karena itu, untuk mengisi kekosongan pendidikan, kita juga mengirim dokter spesialis ke daerah yang membutuhkan. Penugasan ini memang sementara, tetapi masyarakat tidak bisa menunggu," kata Budi.

Selain dokter spesialis, pemerintah menempatkan 3.648 tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui program penugasan khusus di puskesmas yang mengalami kekurangan tenaga. Data hingga Juli 2026 tersebut mencerminkan upaya pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan dasar, terutama di wilayah yang menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan.

Kemenkes juga memberikan dukungan pendidikan melalui 4.592 beasiswa selama periode 2024- 2026. Jumlah itu terdiri atas 2.696 beasiswa dokter spesialis, 1.081 beasiswa dokter dan dokter gigi, serta 815 beasiswa tenaga kesehatan. Pemerintah menyatakan akan meningkatkan ketepatan sasaran penerima, terutama bagi putra-putri daerah yang membutuhkan dukungan pendidikan.

Peningkatan kompetensi dokter spesialis dilakukan melalui program fellowship di luar negeri, terutama untuk memperkuat layanan jantung dan stroke serta kemampuan menggunakan teknologi medis modern. Sebanyak 136 dokter spesialis telah mengikuti pelatihan di Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Dari jumlah tersebut, 65 dokter telah menyelesaikan pelatihan dan kembali ke daerah asalnya.

Tantangan Indonesia tersebut sejalan dengan persoalan global. WHO memperkirakan dunia berpotensi mengalami kekurangan sekitar 11 juta tenaga kesehatan pada 2030. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dokter tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah lulusan, tetapi juga pemerataan penempatan, kualitas pendidikan, dan keberlanjutan tenaga kesehatan di daerah. Melalui kombinasi pendidikan, penugasan, beasiswa, dan pelatihan lanjutan, Kemenkes berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.(*)

Kemenkes Targetkan 80 Persen Penderita Katarak Dioperasi, Deteksi Dini Diperluas



Peliput: Warman

JAKARTA, BP- Pemerintah menargetkan sedikitnya 80 persen penderita katarak tingkat sedang hingga berat mendapatkan operasi, disertai sasaran pemulihan ketajaman penglihatan yang baik pada minimal 80 persen pasien pascaoperasi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menekan risiko kebutaan dan mengurangi dampak gangguan penglihatan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan target tersebut saat menghadiri peringatan World Sight Day 2026 yang diselenggarakan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) di Jakarta, Sabtu (24/10/2026). Pemerintah juga berupaya mengurai antrean operasi katarak dan memperluas pemerataan dokter spesialis mata hingga wilayah terpencil.

"{Gangguan penglihatan, termasuk katarak, memang tidak memicu kematian secara langsung, tetapi sangat menentukan kualitas hidup seseorang," kata Dante. Ia menegaskan, pemerintah bersama Perdami berkomitmen memperluas akses pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat.

Besarnya persoalan tersebut memiliki catatan panjang di Indonesia. Hasil survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) pada 2014-2016 di 15 provinsi menunjukkan prevalensi kebutaan pada penduduk berusia 50 tahun ke atas mencapai 3 persen, dengan katarak sebagai penyebab tertinggi, yakni sekitar 81 persen dari kasus kebutaan. Data tersebut dipublikasikan Kemenkes pada 2019 dan kembali menjadi rujukan dalam berbagai upaya penanggulangan kebutaan nasional. Kemenkes, 2019

Untuk memperluas penanganan, Kemenkes menargetkan sedikitnya satu juta orang yang berisiko mengalami gangguan penglihatan menjalani deteksi dini di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Pemerintah juga menetapkan sasaran Cataract Surgical Rate (CSR) minimal 3.000 tindakan operasi katarak per satu juta penduduk setiap tahun secara nasional.

Strategi tersebut tidak hanya mengandalkan dokter spesialis mata. Kemenkes mendorong penguatan pemeriksaan mata di layanan kesehatan dasar, termasuk melalui funduskopi atau oftalmoskopi untuk melihat bagian dalam mata, terutama retina dan pembuluh darah. Pemeriksaan ini penting untuk menemukan tanda-tanda penyakit mata serius sebelum kerusakan berkembang lebih jauh.

"Kalau semua dokter umum melakukan pemeriksaan funduskopi, kelainan mata akan makin banyak terlihat," ujar Dante. Ia menambahkan, pemeriksaan serupa oleh dokter yang menangani diabetes dapat membantu mendeteksi lebih dini retinopati diabetik, yakni kerusakan pembuluh darah retina akibat komplikasi diabetes.

Ketua Pengurus Pusat Perdami, Prof. Budu, mengatakan tantangan kesehatan mata di Indonesia semakin kompleks. Selain katarak, gangguan refraksi seperti rabun jauh dan silinder, retinopati diabetik, degenerasi makula terkait usia atau age-related macular degeneration (AMD), serta glaukoma turut menjadi penyebab gangguan penglihatan dan kebutaan.

Menurut Budu, perubahan pola hidup dan bertambahnya populasi lanjut usia turut memengaruhi tren penyakit mata. Ia memperingatkan bahwa persoalan kebutaan harus diantisipasi melalui kerja sama pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat, terutama untuk mempercepat penanganan katarak yang masih menjadi penyebab utama kebutaan.

Tantangan ini juga terjadi secara global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporan penglihatan dunia pada 2019 memperkirakan sedikitnya 2,2 miliar orang mengalami gangguan penglihatan atau kebutaan, dengan setidaknya satu miliar kasus dapat dicegah atau belum tertangani. Dalam lembar fakta yang diperbarui pada Februari 2026, WHO kembali menegaskan bahwa katarak dan kelainan refraksi termasuk penyebab utama gangguan penglihatan di dunia. WHO, 2019 WHO, 2026

Perdami mengapresiasi penguatan kemitraan dengan Kemenkes dan mengajak seluruh cabang organisasi tersebut di Indonesia mempercepat upaya pemberantasan kebutaan akibat katarak. Peringatan World Sight Day 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas deteksi dini, meningkatkan akses operasi, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan mata yang merata dan berkualitas. (*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi
Baubau Post
www.baubaupost.com

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupostt2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim
Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Rabu, 28 Oktober 2026 — BAUB AU POST — www.baubaupost.com

Yusril Kaji Perluasan UU Tipikor, Praktik Korupsi Swasta Jadi Fokus Evaluasi



Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra membuka kans penanganan tindak pidana korupsi di sektor swasta tanpa keterlibatan penyelenggara negara.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Pemerintah mengkaji penyempurnaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk memperjelas rumusan tindak pidana, termasuk kemungkinan mengatur korupsi di sektor swasta yang tidak melibatkan penyelenggara negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, evaluasi diperlukan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penegakan perkara korupsi.

Pembahasan tersebut mengacu pada penyelarasan UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Yusril menyampaikan perkembangan kajian itu seusai bertemu Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menyerahkan kajian mengenai wacana penyempurnaan aturan antikorupsi.

Yusril menjelaskan, ketentuan yang berlaku saat ini telah mencakup perkara yang melibatkan pihak swasta, terutama apabila terdapat keterlibatan penyelenggara negara dan unsur kerugian keuangan negara. Korupsi pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu contoh karena praktik tersebut dapat melibatkan perusahaan swasta bersama pejabat pemerintah.

"Hal-hal seperti ini memang harus kita serasikan. Kita mencari agar ketentuan kita sesuai dengan konvensi PBB tentang antikorupsi," kata Yusril.

Selain membuka pembahasan mengenai korupsi sektor swasta, Yusril menyoroti Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Menurut dia, kedua pasal tersebut perlu dievaluasi untuk memperjelas rumusan hukum, bukan menghilangkan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

"Rumusan Pasal 2, Pasal 3 itu memang perlu disempurnakan, bukan dihapus sama sekali," ujarnya.

Yusril mengusulkan agar undang-undang mendatang merinci tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan rumusan berbasis perbuatan yang lebih tegas, batas antara tindakan yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana diharapkan menjadi lebih jelas. Pendekatan tersebut juga ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum dan membantu aparat penegak hukum menerapkan ketentuan secara konsisten.

Secara historis, pembaruan hukum antikorupsi Indonesia menguat setelah Reformasi 1998. Pemerintah menerbitkan UU Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat kelembagaan negara dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

Di tingkat internasional, Majelis Umum PBB mengadopsi UNCAC pada 31 Oktober 2003. Konvensi tersebut mulai berlaku pada 14 Desember 2005 dan diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC mencakup pencegahan korupsi, penegakan hukum, kerja sama internasional, serta ketentuan mengenai penyuapan dan penggelapan aset di sektor swasta. Meski demikian, penerapan sanksi pidana di Indonesia tetap memerlukan dasar hukum nasional yang berlaku.

Yusril juga menyinggung pengalamannya menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pemberantasan terorisme setelah peristiwa Bom Bali pada awal 2000-an. Ia menggunakan pengalaman tersebut untuk menjelaskan pentingnya merumuskan tindakan yang masuk kategori tindak pidana secara terperinci, sehingga batasan hukum tidak bergantung pada penafsiran yang terlalu luas.

"Jadi, kalau nanti Undang-Undang Korupsi juga disepakati seperti itu, akan menjadi sangat jelas perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Di luar itu, dia bukan korupsi," kata Yusril.(*)

KPK Sita Dokumen Vendor, Usut Pengadaan Dana Bencana BNPB Rp148 Miliar



KPK periksa Sestama BNPB Rustian.

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian, Selasa (27/10/2026). Penyitaan itu menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan dengan nilai pengadaan mencapai Rp148 miliar selama periode 2024â€“2026.

Dokumen yang disita berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan sejumlah penyedia barang dan jasa atau vendor. Penyidik juga menelusuri proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penunjukan langsung, hingga pembayaran menggunakan dana darurat kebencanaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan Rustian turut menyasar status kepegawaian Bima Setiawan dan Richard Erlangga. Keduanya merupakan tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Ini statusnya seperti apa, apakah penunjukannya resmi, ada di dalam struktur BNPB atau tidak," kata Budi saat menjelaskan pendalaman penyidik mengenai status kepegawaian kedua orang tersebut.

Selain sebagai Sekretaris Utama, Rustian diperiksa terkait perannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pembina kepegawaian. Penyidik mendalami proses penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit, yang juga menjadi tersangka, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

KPK menduga sejumlah vendor yang terlibat dalam pengadaan tersebut terafiliasi dengan Bima Setiawan. Bima merupakan adik mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Dugaan keterkaitan itu menjadi salah satu aspek yang ditelusuri penyidik dalam mengungkap kemungkinan konflik kepentingan dalam penggunaan DSP.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setiawan, Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika. KPK menyatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan yang menggunakan dana penanganan bencana.

Dana pengadaan yang diselidiki bersumber dari DSP untuk mendukung penanganan berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatra dan Aceh pada November 2025, serta gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Besarnya nilai pengadaan dan sifat darurat penggunaannya membuat proses penunjukan penyedia hingga pembayaran menjadi bagian penting dalam penyidikan.

Secara historis, penggunaan DSP di Indonesia memiliki dasar pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana. BNPB kemudian menerbitkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, yang berlaku sejak 15 Mei 2020. Aturan tersebut menjadi bagian dari kerangka pengelolaan dana darurat kebencanaan.

Dalam konteks internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial (UN DESA) juga menyoroti tingginya risiko korupsi dalam pengadaan pada masa krisis. Prosedur yang dipercepat, kebutuhan mendesak, dan besarnya sumber daya yang dikerahkan dapat meningkatkan risiko suap, kolusi, serta konflik kepentingan apabila pengawasan dan pertanggungjawaban tidak berjalan memadai.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menyatakan bahwa penyidik menemukan dugaan konflik kepentingan dan suap dalam penggunaan DSP BNPB. Temuan tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum yang harus dibuktikan melalui penyidikan dan tahapan peradilan.(*)

Tekan Kecelakaan, Satlantas Polres Baubau Sasar 10 Pelanggaran Prioritas Dioperasi Patuh Anoa 2026 Selama 14 Hari, Polisi Prioritaskan Keselamatan Pengendara

tas," ujarnya.

Sepuluh pelanggaran yang menjadi sasaran meliputi melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, memakai knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, serta melakukan balapan liar. Petugas juga menyasar pengemudi yang tidak memakai sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, pengemudi di bawah umur, sepeda motor yang mengangkut lebih dari satu penumpang, pengendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), serta kendaraan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan.

Chaidir menjelaskan, pelat nomor kendaraan yang menjadi sasaran penindakan ialah TNKB yang tidak sesuai spesifikasi resmi yang diterbitkan Polri melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). "Untuk Operasi Patuh Anoa ini, kita tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Adapun penindakan terhadap pelanggaran diupayakan seminimal mungkin, tetapi ada sejumlah sasaran yang memang menjadi prioritas," katanya.

Dalam pelaksanaannya, petugas berpeluang menggunakan metode hunting atau patroli bergerak untuk menemukan pelanggaran secara langsung. Pemeriksaan stasioner di lokasi tertentu juga dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan hasil koordinasi dengan pihak terkait. Sebanyak 24 personel telah tercantum dalam surat perintah tugas, dengan kemungkinan dukungan personel tambahan.

Selain penertiban lalu lintas, Satlantas Polres Baubau turut memperhatikan kondisi kabut asap yang melanda wilayah kota. Kepolisian sebelumnya telah mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, termasuk ketika berkendara, serta membagikan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak paparan asap.

Chaidir mengatakan, kepolisian akan memantau perkembangan kondisi kabut asap. Jika asap semakin pekat hingga mengurangi jarak pandang, petugas akan mempertimbangkan imbauan agar pengendara menyalakan lampu kendaraan pada siang hari. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan keterlihatan kendaraan di jalan.

Operasi Patuh merupakan bagian dari upaya kepolisian membangun budaya tertib berlalu lintas dan menekan risiko kecelakaan. Secara historis, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 74/299 pada 2020 menetapkan periode 2021-2030 sebagai Dekade Aksi untuk Keselamatan Jalan, dengan target mengurangi kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya 50 persen. Dalam konteks Baubau, upaya tersebut relevan melalui edukasi, kepatuhan terhadap aturan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang berisiko terhadap keselamatan.(*)

Menuju Porprov XV Kendari, IMI Sultra Petakan Potensi Pembalap Muda Kota Baubau

atlet yang akan dipersiapkan belum dapat dipastikan.

"Yang hadir hari ini bukan hanya pembalap pemula dari Kota Baubau, tetapi juga pembalap dari wilayah Kepulauan Buton, termasuk Buton Selatan, yang melaksanakan latihan di lokasi ini," kata Budi.

Ia menilai potensi atlet otomotif di Baubau dan kawasan Kepulauan Buton perlu diikuti pembinaan berkelanjutan. Menurut dia, olahraga bermotor tidak hanya menjadi wadah penyaluran minat generasi muda, tetapi juga membuka peluang bagi atlet untuk berprestasi dan membawa nama daerah ke tingkat provinsi maupun nasional.

Budi juga menyoroti kebutuhan sirkuit sebagai fasilitas latihan yang lebih terarah. Ia berharap Pemerintah Kota Baubau dan pemerintah kabupaten di Kepulauan Buton membuka komunikasi dengan Pengurus Provinsi IMI Sultra serta Koordinator Wilayah IMI Kota Baubau untuk membahas lokasi yang memungkinkan bagi pembangunan lintasan balap.

"Jika fasilitas sirkuit belum tersedia, setidaknya perlu dibuka ruang bagi kami untuk berdiskusi mengenai titik yang tepat untuk pembangunan sirkuit di Kota Baubau," ujarnya.

Secara historis, olahraga otomotif Indonesia memiliki perjalanan panjang. IMI mencatat organisasi pendahulunya, Javasche Motor Club, berdiri pada 27 Maret 1906 di Semarang dan kemudian berubah menjadi Ikatan Motor Indonesia pada 1950. Dalam perkembangannya, balap motor Indonesia juga memasuki panggung internasional, antara lain melalui penyelenggaraan kejuaraan dunia di Sirkuit Sentul pada era 1990-an dan kejuaraan internasional di Sirkuit Mandalika pada era modern.

Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya pembinaan atlet yang ditopang fasilitas latihan dan kompetisi yang memadai. Bagi Baubau dan wilayah Kepulauan Buton, penjaringan menjelang Porprov XV menjadi salah satu langkah awal untuk memetakan potensi pembalap. Dukungan pemerintah daerah dan koordinasi dengan organisasi olahraga diharapkan dapat memperkuat pembinaan serta membuka peluang lahirnya atlet otomotif berprestasi.(*)

Kepala SDN 2 Baadia Baubau Nursida Tekankan Keselamatan Siswa Setelah Pembelajaran Kembali Normal Usai Kabut Asap

"Selama diliburkan, siswa kami tetap diminta membuat laporan pembelajaran selama belajar dari rumah. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah dan pembelajaran dari rumah sangat jauh berbeda," ujarnya.

Ia menambahkan, tidak semua peserta didik memiliki fasilitas yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring. Karena itu, sekolah berharap kegiatan belajar mengajar yang kembali berlangsung di ruang kelas dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan faktor kesehatan dan keselamatan siswa.

Pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka juga menjadi bagian dari upaya memulihkan kegiatan pendidikan setelah terganggu kondisi kabut asap. Secara historis, gangguan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pernah berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan. Pada 2015, misalnya, krisis asap di sejumlah wilayah Indonesia menyebabkan sekolah diliburkan dan kegiatan belajar terganggu. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya menyeimbangkan keberlangsungan pendidikan dengan perlindungan kesehatan.

Melalui surat edaran terbaru, Pemerintah Kota Baubau juga menyarankan satuan pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP di bawah kewenangan Kementerian Agama, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sekolah swasta, serta satuan pendidikan lainnya untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Kebijakan ini menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam menyesuaikan kegiatan belajar dengan kondisi setempat.

Seiring dengan kebijakan tersebut, Surat Edaran Nomor 23/SE/HK/2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh akibat kondisi kabut asap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat edaran terbaru berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan harapan proses pembelajaran di Baubau kembali optimal sekaligus memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik tetap menjadi prioritas.(*)

Bupati Azhari Bawa Potensi Buton Tengah ke Forum Investasi Nasional di Depok

melalui aktivitas ekonomi produktif yang membuka kesempatan pemberdayaan masyarakat.

Azhari juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, dan berbagai pemangku kepentingan agar pengembangan potensi daerah berjalan terarah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara historis, investasi telah menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi di berbagai negara. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi salah satu landasan hukum penyelenggaraan investasi, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, tantangan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nilai investasi, tetapi juga pemerataan manfaatnya.

Melalui partisipasi dalam diskusi nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap potensi daerah semakin dikenal di tingkat nasional dan mampu membuka peluang investasi berkualitas. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian lokal sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring perkembangan daerah.(*)

ASDP Digitalisasi Tiket Baubau-Waara, Antrean Berkurang dan Manifes Lebih Akurat

an tiket, mengurangi antrean di pelabuhan, menekan praktik percaloan, sekaligus meningkatkan akurasi data penumpang dalam manifes kapal demi mendukung keselamatan pelayaran.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau, Capt. Amir, mengatakan layanan tersebut mulai dapat digunakan masyarakat pada 19 Oktober 2026 pukul 13.00 Wita. Calon penumpang dapat memesan tiket secara daring melalui laman resmi Ferizy sebelum berangkat ke pelabuhan.

"Dengan adanya e-ticketing ini, masyarakat bisa membeli tiket dari rumah. Jadi, tidak harus mengantre dan tidak perlu melalui calo. Pengguna jasa bisa melakukan reservasi sendiri sebelum berangkat ke pelabuhan," kata Amir, Selasa (27/10/2026).

Menurut Amir, penerapan tiket elektronik juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pelayanan penyeberangan melalui pencatatan identitas penumpang yang lebih tertib. Data yang dimasukkan saat pemesanan diharapkan sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP), sehingga informasi dalam manifes kapal lebih akurat dan dapat membantu proses administrasi apabila terjadi kecelakaan.

"Kalau pengguna jasa membeli tiket melalui Ferizy, namanya langsung terdaftar dalam manifes kapal. Karena itu, kami berharap nama yang dicantumkan sesuai dengan identitas di KTP," ujarnya.

Meski menawarkan kemudahan, ASDP mengantisipasi kendala pada masa awal penerapan, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Perusahaan menyiapkan petugas teknologi informasi dan pelayanan tiket untuk memberikan edukasi serta mendampingi calon penumpang, termasuk kelompok lanjut usia (lansia).

Digitalisasi ini bukan langkah pertama ASDP Cabang Baubau. Sistem serupa telah diterapkan pada lintasan Kendari-Langara sejak Februari 2026. Menurut Amir, sekitar 50 persen pengguna jasa pada lintasan tersebut kini telah membeli tiket melalui aplikasi. ASDP selanjutnya berencana memperluas penerapan e-ticketing secara bertahap ke lintasan komersial lainnya, antara lain Tampo-Torobulu dan Labuan-Amolengo.

Secara historis, digitalisasi tiket penyeberangan di Indonesia berkembang seiring transformasi layanan transportasi dan kebutuhan pencatatan penumpang yang lebih terintegrasi. ASDP memperkenalkan platform Ferizy pada 2020 untuk memperluas pemesanan tiket penyeberangan secara daring. Di tingkat internasional, Organisasi Maritim Internasional (IMO) juga mendorong peningkatan keselamatan pelayaran melalui penerapan standar keselamatan kapal dan pengelolaan informasi pelayaran. Dalam konteks Baubau-Waara, manfaat sistem baru ini akan bergantung pada ketepatan data identitas, kesiapan petugas, dan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan layanan digital.

Penerapan e-ticketing diharapkan membuat proses pembelian tiket lebih praktis sekaligus memperkuat ketertiban administrasi penumpang. ASDP masih perlu memastikan pendampingan berjalan efektif agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan seluruh pengguna jasa, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan aksesibilitas layanan.(*)

KOTA
BAU-BAU

PEMERINTAH
KOTA BAUBAU

KERJA
BERSAMA

H. YUSRAN FAHIM.

WA ODE HAMSINAH

H. YUSRAN FAHIM, S.E.,
WALI KOTA BAUBAU

Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc.,
WAKIL WALI KOTA BAUBAU

Selamat Memperingati

HARI
SUMPAH
PEMUDA

KE - 98 TAHUN 2026

98 TAHUN
SUMPAH
PEMUDA

"PEMUDA BERSATU
INDONESIA MAJU"